

TAJUK RENCANA

Pilkada Telah Selesai

PILKADA sudah selesai. Begitu pernyataan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu peserta Pilkada 2020 Kota Solo, selesai tahapan pemungutan suara. Putra Presiden Joko Widodo itu maju sebagai Calon Walikota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa. Dalam Pilkada 2020, Rabu (9/12) pasangan ini meraih lebih dari 85 persen suara, menurut hasil hitung cepat. Gibran kemudian menyatakan Pilkada telah selesai. Tidak ada lagi kubu-kubuan, tetapi yang ada bersatu kembali untuk membangun Kota Solo ke depan.

Pernyataan serupa diungkapkan Bupati Sleman Sri Purnomo, bahwa Pilkada telah selesai sehingga tidak perlu ada oposisi. Semuanya menjadi satu untuk sama-sama menyukseskan pembangunan di Kabupaten Sleman. Menurutnya, wajar kalau dalam Pilkada ini ada tiga kelompok, karena Pilkada Sleman 2020 memang diikuti tiga peserta (pasangan calon).

Dalam Pilkada 2020 yang dilaksanakan serentak 9 Desember lalu, di Jawa Tengah diselenggarakan di 21 kabupaten/kota, sedangkan di DIY dilaksanakan di tiga kabupaten. Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai pihak, telah memunculkan berbagai reaksi. Tentu saja semua kandidat optimistis dan merasa layak memenangkan Pilkada ini.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada masih melakukan rekapitulasi perolehan

suara Pilkada 2020. Sementara itu, beberapa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Bahkan ada yang mengklaim sebagai pemenang Pilkada 2020.

Perang pernyataan, saling klaim, apalagi sudah mengumpulkan masa untuk merayakan kemenangan, tentu akan menjadi tindakan yang kontraproduktif. Bahkan bisa memicu ketidaknyamanan masyarakat. Seharusnya, semua bisa mengendalikan diri, termasuk mengendalikan tim sukses agar tetap tercipta suasana kondusif.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, mestinya semua pihak tidak hanya perlu memperhatikan kesehatan dan demokrasi, tetapi juga kesehatan masyarakat, agar tetap aman dan nyaman. Semua pihak seharusnya punya kesadaran melaksanakan protokol kesehatan. Pilkada 2020 memang telah selesai, tetapi pandemi Covid-19 masih mengancam.

Masyarakat sudah menunggu kiprah nyata para calon pemimpin yang terpilih lewat Pilkada 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menaruh perhatian besar terhadap kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada serentak 2020. Diharapkan, nantinya kepala daerah terpilih tidak kemudian memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Sebaliknya, mereka akan membuat kebijakan publik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. □

Hukuman Mati dan Korupsi Bansos

Rangga Asmara

menjadi bencana nasional, tetapi telah menjadi bencana global. Penyalahgunaan dana bansos oleh Menteri Sosial sangat melukai hati rakyat yang menderita akibat pandemi Covid-19.

Indeks Persepsi Korupsi

Namun begitu, banyak penelitian tidak berhasil menyimpulkan dan membuktikan bahwa ada hubungan kausal-



KR-JOKO SANTOSO

WACANA pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor kembali mengemuka, setelah KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Headline sejumlah media sosial bergolak ketika dana bansos dikorup. Seolah ini soal yang sangat keterlaluan. Publik tidak boleh lupa jika dana Alquran (2012) dan haji (2016) juga pernah dikorup. Urusan ketuhanan yang sakral saja digasak, apalagi urusan kemanusiaan. Benar kiranya jika korupsi didalilkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Bergulirnya wacana ini sejatinya bukan hal baru. Pidana hukuman mati sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Frasa 'keadaan tertentu' berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pasal 2 ayat (2) dianggap dapat menjadi payung hukum pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Penyebaran Covid-19 tidak hanya

tas antara hukuman mati dengan penjara umum (membuat orang lain takut melakukan tindak pidana). Selain itu, peringkat negara dengan indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perception index* (CPI) tertinggi justru bukan dari negara-negara yang menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi. Hal ini terjadi di Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Jerman.

IPK menggambarkan pandangan para ahli dan pelaku usaha terhadap tingkat korupsi di sektor publik dengan skala 0 hingga 100. Angka 0 menandakan suatu

negara dianggap amat korup, sedangkan angka 100 amat bersih. IPK 2018 negara-negara besar di Eropa memang bercokol di angka 80, seperti Denmark (88) Inggris (80), Finlandia (85), Belanda (82), dan Jerman (80). Sementara itu, Tiongkok yang menjadi rujukan penerapan hukuman mati bagi koruptor hanya memiliki IPK 39.

Nilai IPK Tiongkok sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 pada tahun 2015 hingga 2018. Kondisi ini menggambarkan penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi. Sebaliknya, tanpa menerapkan hukuman mati, beberapa negara di Eropa tersebut terbukti dapat berhasil terbebas dari masalah korupsi.

Penggunaan hukuman keras tidak menjamin menunjukkan hasil yang diharapkan. Pemberantasan korupsi jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya dengan perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Memang hukuman mati memenuhi tujuan pemidanaan dan hasrat pembalasan (*retributif*), namun jika penegak hukumnya masih tidak bebas dan imparial (terpengaruhi kepentingan penguasa), proses peradilan justru berjalan tidak adil dan baik bahkan berlangsung koruptif. □

* **Rangga Asmara**, Dosen Universitas Tidar Magelang.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Memadukan KB dan Wisata

MEMADUKAN program KB dengan wisata yang dimotori dan difasilitasi oleh BKKBN, setidaknya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu lewat promosi, penjualan produk maupun atraksi. Memadukan KB dengan wisata lewat promosi bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan promosi tempat wisata dengan program KB. Misalnya, menginformasikan tempat wisata yang dipromosikan merupakan tempat ideal untuk wisata keluarga.

Pesan-pesan moral terkait dengan pelaksanaan 8 fungsi keluarga dapat dipajang di tempat-tempat strategis, seperti Sudahkah Anda Sholat? Kesopanan Anda Sangat Kami Hargai, Jagalah Kesopanan, Tunjukkan Senyum dan Perahabatanmu! Berikan Rasa Nyaman dan Aman pada Sesama Pengunjung, Ayo Ikut KB, 2 Anak Lebih Sehat, Jangan Korbankan Masa Depanmu untuk Perbuatan Sia-sia, Berikan Tauladan yang Baik dengan Membuang Sampah pada Tempatnya, Lelah Kerja Yuk Berwisata, dan sebagainya.

Sementara memadukan KB dan wisata lewat penjualan produk dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) binaan BKKBN bersama OPD KB di Kabupaten/Kota dalam penjualan produk makanan minuman, barang kerajinan dan jasa di tempat wisata yang dikelola oleh pokdarwis. Penjualan produk yang berlabel kelompok UPPKS dengan pesan KB ini dapat ditata sedemikian rupa pada deretan warung-warung makanan di tempat wisata atau di pusat penjualan produk khas tempat wisata tersebut.

Sedangkan memadukan KB de-

ngan wisata melalui atraksi dapat dilakukan dengan pentas seni budaya untuk menambah daya tarik wisata dengan kegiatan yang selama ini mendukung program KB. Seperti peragaan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) maupun pentas seni untuk mendukung Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB Pria (Jathilan/Reog Soreng). Juga aktivitas di Kampung KB yang kegiatannya sangat beragam. Dengan adanya Kelompok Seni Peduli Keluarga Berencana (KSP-KB) tentu akan menambah variasi atraksi wisata yang dipadukan dengan KB baik dari sisi konten isi maupun penamaan/nomenklatur atraksi seperti Tarian Generasi Berencana, Guyon Maton KB, Limbukan KB, Campursari KB, Senam Kuhias Kenanganku dan sebagainya.

Walhasil, bila upaya memadukan KB dengan wisata berhasil, tentu akan meningkatkan gairah dan daya tarik pariwisata di DIY. Kondisi ini dipastikan akan menambah daya tarik wisata yang dikembangkan yang imbasnya menambah jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara, menambah waktu lama tinggal serta menambah income masyarakat/daerah sehingga kesejahteraan meningkat. Dan yang lebih penting, kesan nyinyir yang selama ini melekat di banyak tempat wisata dapat dikurangi atau sama sekali dihilangkan. □

Drs Mardiyah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Daldud dan KB Kabupaten Kulonprogo.

'Explore' Kearifan Lokal, Kembangkan UMKM

BERBAGAI usaha di berbagai daerah tentu terdampak pandemi covid-19, akan tetapi semangat UMKM untuk bangkit perlu digalakan. Pemasaran secara digital tentunya belum cukup untuk membangkitkan geliat UMKM. Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) DIY menghadirkan pameran online dan offline. Gelaran produk si bakul bertema "Inspirasi Jogja Istimewa Menembus Batas" menjadi wadah bagi UMKM untuk mengesplor kearifan lokal KR (7/12).

Kearifan lokal masyarakat tentu tidak terlepas dengan budaya dan adat istiadat yang diturunkan nenek moyang. Kearifan lokal tersebut juga tercermin dalam berbagai makanan minuman tradisional, kerajinan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Tidak sedikit UMKM yang mengembangkan bisnis usaha warisan leluhur. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri sehingga dapat dijadikan daya tarik bagi konsumen. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu mengembangkan kearifan lokal tidak hanya produk yang dipasarkan namun juga strategi pemasaran.

Strategi Pemasaran

Program digitalisasi UMKM oleh pemerintah menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kearifan lokal produk UMKM setiap daerah. Makanan daerah lain bahkan di kancah internasional. Produk lokal seperti kerajinan perak dan minuman tradisional serta kerajinan sutera daerah dapat menjadi primadona di, gerabah, batik, tenun, ukiran tentu disetiap daerah memiliki kekhasan tersendiri bahkan di negara lain belum banyak yang mengembangkannya. Begitu juga dengan berbagai makanan khas seperti gudeg, rendang, jengkol, mangut lele. Juga pelbagai minuman dan jajan tradisional seperti wedang uwuh, bandreg, bajigur, jamu dan lainnya.

Iis Suwartini

Makanan dan minuman tradisional pun kini tersedia dalam makanan cepat saji sehingga dapat dinikmati di berbagai belahan dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (UPT BPTBA) yang berada di Yogyakarta menawarkan pengemasan tradisional dengan teknologi pengalangan. Teknologi tersebut dinilai cukup efektif karena dalam proses pengemasan tidak perlu menambahkan pengawet. Sterilisasi pada suhu 121 derajat dalam jangka waktu minimal 3 menit sudah mampu mengancurkan bakteri patogen namun kandungan gizi masih terjaga. Untuk daya simpan kurang lebih satu tahun.

Teknologi pengalangan merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih UMKM yang bergerak pada bidang makanan dan minuman tradisional untuk memenuhi perkembangan zaman. Pada situasi pandemi covid-19 saat ini tentunya banyak yang memilih makanan dan minuman cepat saji karena dinilai lebih higienis dan meminimalisasi terpapar virus corona.

Branding Produk

UMKM yang bergerak pada kerajinan perlu memperhatikan branding produk bernuansa lokal. Salah satunya perencanaan media komunikasi visual. Perancangan media didasarkan pada hasil analisis konsumen dalam hal konsumsi media. Adapun yang perlu diperhatikan diantaranya (1) pemilihan tipografi digunakan jenis huruf serif Trajan Pro bentuk tersebut

memudahkan mata pembaca melakukan penelusuran, (2) pilihlah warna coklat memberi kesan alami dan elegan, (3) kemasan perlu didesain mengesung budaya bisa tambahkan ornamen tradisional atau pernak-pernik pada kemasan.

Desain kemasan yang menarik baik warna, bentuk, dan motif dapat meningkatkan ketertarikan pembeli dan meningkatkan harga jual. Kemasan yang menarik dan elegan serta sesuai dengan konsep kearifan lokal tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Pangsa pasar kerajinan tentunya tidak hanya untuk kebutuhan pribadi namun juga dapat dijadikan sebagai cinderamata bagi kolega, hadiah ulang tahun, souvenir pernikahan dan hampers. Oleh karena itu, UMKM perlu melakukan trobosan baru tidak terkecuali pada kemasan. Kemasan yang unik dan menarik tentu akan menjadi pilihan konsumen sebagai hadiah istimewa bagi keluarga dan kolega. Fungsi kemasan kini tidak hanya untuk melindungi tetapi juga branding produk. □

* **Iis Suwartini**, M.Pd. Dosen PBSI FKIP UAD mahasiswa S3 PBI UNS.

Pojok KR

Dua pasangan calon bupati-wakil bupati Gunungkidul saling klaim kemenangan.

-- **Tunggu KPU.**

KPK ingatkan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2020 menghindari korupsi.

-- **Ingat itu!**

Pemkot Solo diminta membuat 'call centre' terkait karantina pemudik.

-- **Utamakan komunikasi.**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyuwangi: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Arsul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu': Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display: Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%